



BOOK REVIEW

Judul : Mata Air Keteladanan, Pancasila Dalam Perbuatan
Pengarang : Yudi Latif
Tahun Terbit : 2014
Penerbit : Mizan
Jumlah Halaman : 650
Ukuran buku : 23x15 cm

MAHALNYA KETELADANAN PANCASILA

Muhamad Karim

Dosen Fakultas Bioindustri Universitas Trilogi, Jakarta 12760, Indonesia
e-mail: karimlaode@universitas-trilogi.ac.id

Buku karangan Yudi Latif berjudul **“Mata Air Keteladanan. Pancasila dalam Perbuatan”** adalah kelanjutan dari buku sebelumnya **“Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila (2011)”**. Bila buku pertama Yudi Latif menganalisis secara mendalam soal aspek sejarah, rasionalitas dan aktualitas Pancasila, maka buku kedua ini Yudi mengisahkan keteladanan para tokoh bangsa baik yang sudah almarhum maupun masih hidup semacam Jokowi dan Rismaharini. Buku kedua ini Yudi Latif mampu mengkontekstualisasikan nilai-nilai sila Pancasila dalam kisah perilaku para tokoh pendiri bangsa dan pemimpin bangsa. Ia mengisahkan bagaimana kisah-kisah hidup para tokoh yang mencerminkan kejujuran, kesederhanaan, integritas dan penghormatan kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka adalah sosok-sosok yang menghargai perbedaan, manusiawi dan santun, mencintai tanah airnya, adil dan solider. Mungkin tak terbayangkan pada masa kini tokoh bangsa, I. J. Kasimo, Ketua Umum Partai Katolik menjadi Ketua Panitia perbaikan rumah Prawoto Mangkusasmito, Tokoh Partai Masyumi. Kasimo rela mengantar map berisi les untuk mencari sumbangan perbaikan rumah Prawoto. Ini sebuah keteladanan luar biasa (hal 2). Kedua tokoh bangsa ini tak pernah memikirkan “perbedaan” etnik, suku maupun agama. Mereka tetap membangun cara hidup yang harmoni, dan penuh nilai-nilai kebajikan. Saling menolong dan membantu serta saling mencintai itulah dasar segala agama kata Yudi Latif (hal 44).

Hadirnya buku kedua Yudi Latif ini bagai “oase” dan menginspirasi kita sebagai bangsa Indonesia ditengah kesulitan mencari

“keteladanan”. Pasalnya, setiap hari hanya kita menyaksikan perilaku penguasa, tokoh politik, agamawan, mantan aktivis idealis hingga masyarakat yang “permisif” terhadap perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Seolah-olah perilaku KKN dianggap hal jamak dan lazim sehingga tak perlu dipersoalkan. Hingga muncul *“adagium”* bahwa tak ada lagi yang dapat dipercaya di Negara ini. Eksekutif, legislatif dan yudikatif semua terlibat KKN. Hampir saja menimbulkan keputusan kolektif. Mengapa demikian, karena tidak ada lagi “teladan”. Juga, kian tingginya *“deficit social”* dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hampir setiap hari kita menyaksikan konflik, perkelahian antar pelajar, tingginya angka kriminalitas (pencurian, perampokan) hingga konflik dalam perebutan sumberdaya alam. Perilaku elit politik pun kian jauh dari keteladanan. Justru yang menonjol adalah perilaku individualisme dan egosentrisme. Sulit sekali antar pemerintah daerah saling menghormati. Umpamanya, seorang Bupati/Walikota belum tentu mau taat pada kebijakan Gubernur akibat adanya desentralisasi kewenangan dan kekuasaan. Seolah negeri ini dihuni para raja-raja kecil yang amat berkuasa. Kini perilaku hidup bergotong-royong, mengedepankan harmoni, pluralisme dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan bak barang mahal. Yudi Latif dalam tulisannya di Kompas berjudul “Keteladanan Pancasila” menegaskan bahwa kita bangsa Indonesia “gagal” mentransformasikan kisah keteladanan para “Pahlawan” bangsa baik yang sudah wafat maupun masih hidup. Permasalahan ini muncul katanya akibat pelajaran sejarah menyempit menjadi sejarah (tahun) peperangan dan silsilah

kerajaan, tidak membantu menemukan mutiara “pesan moral” yang terpendam dalam lumpur sang waktu. Kesalahannya menurut Yudi, karena Pancasila diajarkan lewat butir-butir hafalan yang menjemukan, kehilangan impresi yang bisa menggugah nurani. Yudi menegaskan bahwa sebuah ideologi semacam Pancasila dalam konteks bernegara semestinya mampu memadukan dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. Idealnya, *pertama*, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntutan-tuntutan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup. *Kedua*, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. *Ketiga*, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan itu dalam realitas kongkrit.

Dalam buku keduanya ini Yudi Latif mencoba mengangkat kisah-kisah keteladanan para tokoh bangsa yang mampu mentransformasikannya dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang dituntun oleh ideologi Pancasila. Suatu kisah yang kian jauh di masa kini. Kendati Yudi masih mencoba menampilkan beberapa tokoh seperti Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta) dan Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) yang dinilainya masih menjadi “oase” ditengah kehausan keteladanan. Penulis meyakini masa di masa kini sesungguhnya masih banyak tokoh yang mungkin levelnya tidak masuk level nasional tapi memberi keteladanan pada masyarakat. Simaklah orang-orang yang selalu dimuat dalam sosok harian Kompas hampir setiap hari. Mereka adalah kisah-kisah teladan yang berprofesi sebagai guru, pelestari seni, karya seni dan sastra, bahasa lokal, pegiat petani, penjaga alam dan kekayaannya (hutan, danau dan laut) hingga pendidik. Mereka memang tak pernah muncul di televisi maupun Koran setiap hari. Tapi hemat penulis mereka itu teladan-teladan Pancasila yang melestarikan nilai-nilai kebajikan, budaya gotong-royong, serta harmoni kehidupan manusia dan alam. Dimasa yang akan datang Yudi Latif atau penulis lainnya akan menyajikan buku-buku lainnya yang mengisahkan keteladanan-keteladanan masyarakat Indonesia yang beragam budaya, terpisahkan geografis sebagai Negara kepulauan hingga keragaman kekayaan alamnya. Masyarakat Indonesia memiliki kearifan-kearifan lokal dalam memelihara alam, membangun kohesif sosial, dan menjaga kelestarian dan keberlanjutan alam dan sumberdayanya. Hingga, manajemen

pemerintahan berbasis pengetahuan dan nilai-nilai lokal yang positif. Contohnya, bagaimana orang Bali mampu menghargai air untuk mengairi sawah dan memelihara ikan dengan model manajemen air yang kita kenal subak. Juga, masyarakat danau lindu di Sulawesi Tengah menjaga ekosistem danau dan sumberdaya ikan secara komunal dengan mengedepankan budaya gotong-rotong dan nilai-nilai adat, sehingga mereka mampu mengkonsumsi ikan sepanjang tahun tanpa harus merusaknya dan mengeksploitasinya secara berlebihan. Orang di danau lindu menyebutnya “*Ombo*” yaitu menghentikan aktivitas penangkapan ikan dalam jangka waktu tertentu agar ikan tetap lestari. Persis sama dengan “*Lubuk Larangan*” di Sumatera Barat, Riau, Mandailing Natal, Sumatera Utara yang dibangun dalam sistem demokrasi deliberatif dalam bentuk “kesepakatan permusyawaratan” dalam institusi adat “*Ninik Mamak*”. Inilah ide demokrasi yang tersirat dalam sila keempat Pancasila yaitu “permusyawaratan/perwakilan”(Hardiman, Kompas/10/10/2012). Hemat penulis, hadirnya buku “Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan”, bukan sekedar sebagai referensi dalam khazanah intelektual, melainkan bisa menjadi bahan rujukan pembelajaran Pancasila mulai dari Pendidikan Dasar, Menengah hingga Perguruan Tinggi. Bisa saja bentuknya dapat dibuat dalam bentuk lain sesuai dengan tingkat perkembangan dan kapasitas pemahaman anak didik. Umpamanya, dibuat dalam bentuk karya sastra yang mengisahkan keteladanan para tokoh bangsa maupun masyarakat dalam bentuk komik, novel, cerita pendek maupun karta seni maupun sastra lainnya. Dengan demikian proses internalisasi dan ideologisasi nilai-nilai Pancasila mampu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga.

DAFTAR ACUAN

- Hardiman FB. 2012. Delliberasi Publik. Opini Kompas 10 Oktober 2012.
- Latif Y. 2014. Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan. Jakarta: Mizan.
- _____. 2011. Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas. Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2014. Keteladanan Pancasila. Opini Kompas 23 Maret 2014.

